



HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN INDEKS KEMISKINAN DAN KELAPARAN DI INDONESIA

B.S. Nazamuddin¹ dan Ery Jayanti²

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Fakultas Ekonomi Universitas Jabal Ghafur

Penulis korespondensi: B.S. Nazamuddin (nazamuddin@unsyiah.ac.id)

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah menemukan pengaruh pendidikan sekunder dan tersier terhadap taraf hidup yang diukur dengan indikator negatif Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK). Data yang bersumber dari BPS digunakan adalah Indeks komposit IKK yang merangkum Indeks Kedalaman Kemiskinan tingkat Provinsi, proporsi penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan tingkat provinsi, dan proporsi penduduk yang mengkonsumsi kalori di bawah 1400 ccal per hari per jiwa. Perhitungan IKK dilakukan, kemudian pemilihan model dilakukan. Setelah model yang tepat dipilih, dilakukan estimasi terhadap IKK sebagai variabel terikat dan persentase penduduk dengan pendidikan sekunder dan pendidikan tersier sebagai variabel penjelas. Variabel kontrol terdiri dari pendapatan per kapita, jumlah pekerja mandiri, jumlah pekerja formal dan jumlah pekerja bebas nonpertanian. Analisis data panel dilakukan setelah model yang tepat dilakukan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tersier berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IKK, sementara persentase penduduk dengan pendidikan sekunder tidak signifikan mempengaruhi IKK. Satu cara untuk meningkatkan taraf hidup melalui penurunan IKK adalah dengan peningkatan pendidikan, terutama untuk daerah-daerah yang angka melanjutkan pendidikan ke tersier masih rendah.

Kata Kunci: Indeks Kemiskinan dan Kelaparan, Pendidikan Sekunder, Pendidikan Tersier

Pendahuluan

Kualitas hidup adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Yang sangat penting dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak dan hidup normal. Kualitas sumber daya manusia diukur melalui tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pekerjaan yang layak. Menurut UNDP (2007) dan OECD (1982), indikator kualitas hidup adalah pendapatan, perumahan, lingkungan, stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan layak. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) yang diperkenalkan oleh PBB pada tahun 2015 dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk semua. Tujuan SDGs yang keempat adalah menjamin bahwa pada tahun 2030 memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar



seumur hidup bagi semua. SDGs, yang juga dikenal sebagai Tujuan Global (Global Goals), merupakan himbauan universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan menjamin semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan pada tahun 2030. Sekumpulan 17 tujuan global yang terintegrasi dalam SDGs menyiratkan perlunya pemahaman bahwa satu tindakan dapat menentukan capaian di bidang lain, dan bahwa pembangunan harus berimbang antara bidang sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan (UNDP, 2019). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan untuk memenuhi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Kualitas pendidikan adalah di antara tujuan-tujuan tersebut di samping kesehatan yang baik dan kesejahteraan, serta konsumsi dan produksi. Salah satu variabel yang menentukan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan), dalam hal ini Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK), adalah tingkat pendidikan.

Penelitian ini bertujuan menemukan hubungan antara pencapaian satu indikator penting, yang dianggap mewakili salah satu SDGs, yaitu Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK) dengan tingkat pendidikan. IKK atau Poverty and Hunger Index (PHI) adalah indeks komposit yang merupakan indikator multidimensional tentang kemiskinan dan kelaparan yang juga telah digunakan sebelumnya sebagai salah satu instrumen dalam memantau pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals - MDGs). Indikator ini, MDG-1, menargetkan berkurangnya kemiskinan dan kelaparan hingga separuh pada 2015 dibandingkan kondisi 2000. Dengan demikian, penelitian ini relevan karena ketidaktercapaian tersebut mungkin berhubungan dengan capaian dalam bidang pendidikan. Pertanyaan penelitian adalah apakah tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk mempengaruhi ketercapaian tujuan dan target MDGs dan SDGs pada indikator penurunan indeks kemiskinan dan kelaparan (IKK).

Penelitian sebelumnya melihat masing-masing indikator secara terpisah. Alarcon et al (2016) hanya mengamati kecukupan nutrisi dan gizi pada rumah tangga berpendapatan rendah, sementara Annestrand, Lenz, Bird, and James, (2017) hanya fokus pada dampak tingkat pendapatan terhadap keamanan makanan pada komunitas pedesaan. Selanjutnya Abdullah et al (2017) mengamati pengaruh pendidikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga dan Nwokolo (2017) mengamati pengaruh tingkat pendidikan terhadap kerawanan pangan. Penelitian ini mengestimasi pencapaian IKK dalam SDGs (termasuk MDGs).



Literatur

Pendidikan terkait dengan kemiskinan dan pendapatan, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Pada tingkat mikro, individu atau rumah tangga yang buta huruf kurang produktif, pekerjaan subsisten, dan tidak tetap pada tingkat kehidupan yang sangat rendah, kebanyakan hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tingkat makro, negara-negara dengan masyarakat yang buta huruf atau kurang berpendidikan tidak dapat keluar dari ketertinggalan, tidak mampu meningkatkan produktivitas mereka secara substansial, dan sebahagian tetap bertahan dengan standar hidup yang rendah. Beberapa penelitian menemukan adanya dampak positif pendidikan pada penurunan kemiskinan. Meningkatnya pengalaman dan pencapaian pendidikan mengurangi kemungkinan menjadi miskin dari individu yang dipekerjakan (Mom Nyong, 2011). Bahkan tingkat pendidikan sekunder dan tersier juga berpengaruh dalam meningkatkan pengeluaran per kapita dari rumah tangga. Semua jenis pengeluaran seperti makanan, pakaian, dan sebagainya mencerminkan tingkat kesejahteraan. Penurunan kemiskinan tidak saja bergantung pada pendidikan primer, melainkan juga pada capaian pendidikan pada jenjang lebih tinggi.

Kendati demikian, pendidikan dasar adalah gerbang awal dari modal manusia untuk pendidikan menengah dan tinggi. Investasi di tingkat pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang sains dan teknologi dapat mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat melalui kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sofian, Amin, dan Afra (2016) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara pendidikan tinggi, terutama tingkat universitas dengan peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Namun tidak ada bukti kuat ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara buta huruf, pendidikan primer, dan pendidikan sekunder. Thapa (2013) menemukan bahwa putus sekolah dan tingkat partisipasi sekolah keduanya merupakan fungsi positif dari tingkat kemiskinan.

Sementara itu, Abdullah et al (2017) menemukan bahwa pendidikan kepala rumah tangga berhubungan positif dengan gaji yang mereka terima. Ia juga menyimpulkan bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam ketahanan pangan rumah tangga. Demikian pula halnya, Mutisya, Ngware, Kandala, Kabiru (2016) menunjukkan bahwa bila tingkat pendidikan meningkat 1 persen, maka ketidakamanan pangan menurun sebesar 0.019 persen. Gunatilake, et al (2007) mengemukakan bahwa preferensi terhadap air minum yang aman dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: karakteristik rumah tangga, meliputi



pendapatan, kekayaan, pendidikan, dan lain-lain; karakteristik demografi, seperti perbedaan kota dan desa; dan karakteristik air minum, meliputi harga, biaya sambungan, pelayanan, dan lain-lain. Mereka menyimpulkan bahwa harga, pendapatan, dan pendidikan merupakan variabel sosio-ekonomi penting yang mempengaruhi preferensi dan permintaan terhadap air minum yang aman. Dengan demikian, kesadaran mengkonsumsi air minum yang aman berhubungan erat dengan pendidikan.

Dalam analisis kemiskinan, indeks FGT (Foster, Greer dan Thorbecke, 1984) merupakan indeks yang paling populer digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Indeks ini dapat diturunkan menjadi tiga indeks yang sering digunakan dalam kajian kemiskinan yaitu Headcount Ratio (persentase penduduk miskin), Poverty Gap Ratio (indeks kedalaman kemiskinan) dan Poverty Severity Ratio (Indeks Keparahan Kemiskinan). Kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu isu global dimana melalui MDGs pada awalnya disepakati untuk menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan di Indonesia hingga setengahnya pada tahun 2015. Sehingga kemiskinan dan kelaparan tak dapat dipisahkan.

Kelaparan adalah istilah yang sehari-hari digunakan untuk merujuk pada sensasi tubuh yang biasanya diasosiasikan dengan puasa, nafsu makan, dan motivasi umum untuk makan. Secara fisiologis, rasa lapar dapat didefinisikan sebagai "sinyal biologis untuk membuat organisme sadar akan pengurangan sumber energi yang membutuhkan tindakan koreksi jangka pendek, kebutuhan homeostatik dimediasi oleh rasa lapar dan kenyang, dan kebutuhan hedonis dimediasi oleh pusat saraf otak" (Khalsa-Zemel, 2017).

Global Hunger Index (GHI) adalah alat statistik multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan keadaan kelaparan negara. GHI mengukur kemajuan dan kegagalan dalam perang melawan kelaparan global. Tingkat konsumsi yang minimum adalah 1.400 kilo kalori per kapita per hari. Pada tahun 2011 GHI mencapai 14,65 persen, masih jauh dari target MDGs yang ditetapkan, yakni sebesar 8,50 persen tahun 2015. Inie berarti bahwa target MDGs berupa angka kemiskinan dan kelaparan belum tercapai. Maka, SDGs melanjutkan penetapan target ini hingga tercapai 100 persen pada tahun 2030. Laporan Indeks Kelaparan 2017 menyajikan ukuran multidimensi kelaparan nasional, regional, dan global. Indikator ini menunjukkan bahwa dunia telah membuat kemajuan dalam mengurangi kelaparan sejak tahun 2000, namun



kemajuannya tidak merata. Nilai 50,0 atau lebih mencerminkan tingkat kelaparan yang sangat mengkhawatirkan. Posisi Indonesia saat ini pada angka 10-19. Abhilaksh (2013) mengemukakan bahwa kemajuan dalam mencapai target yang ditetapkan untuk tujuan pembangunan MDGs adalah mewujudkan standar universal untuk bebas dari kemiskinan ekstrem.

Penelitian Faharuddin (2014) menyimpulkan bahwa indeks kemiskinan dan kelaparan dapat dipetakan sebagai indeks pembangunan manusia (kualitas hidup). Meskipun peringkat IKK tidak selalu sejalan dengan kualitas hidup, namun korelasi linier keduanya sangat signifikan. Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK) memiliki hubungan linier yang signifikan dengan pendapatan per kapita. Menurut Wang, Feng, Xia dan Alkire (2016), garis kemiskinan berhubungan dengan kemiskinan secara multidimensi sebesar 69 persen. Mereka menunjukkan kenaikan pendapatan dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan secara multidimensi, walaupun dampaknya kecil. Kualitas hidup melalui pendekatan pengeluaran per kapita berhubungan dengan penduduk yang hidup di bawah batas garis kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan. Cova dan Stacova (2012), untuk kasus Republik Ceko, menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan rumah tangga positif dalam beberapa waktu, pendapatan rata-rata hanya dicapai oleh kategori pendidikan ketrampilan sebesar 68,8 persen dan pendidikan tinggi dengan nilai 32,3 persen. Ini menunjukkan adanya ketergantungan tingkat pendidikan dan pendapatan.

Selanjutnya, pendapatan perdesaan diyakini sebagai kekuatan dominan dibalik penurunan kemiskinan daerah pedesaan di China (Yue at al (2014). Sebaliknya Ren, Gei, Wang, Mao, Zang (2017) menemukan bahwa pendapatan perdesaan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, namun memiliki efek yang berbeda pada daerah-daerah yang dilanda kemiskinan yang parah. Sementara itu, ketika pendapatan rumah tangga menurun, prevalensi ketidakamanan pangan meningkat, semakin rendah pendapatan semakin besar kemungkinan individu untuk makan makanan dengan porsi lebih kecil dari kebutuhan yang seharusnya mereka makan. 83 persen individu harus makan dengan porsi kecil bagi yang memiliki pendapatan di bawah \$ 20.000 (Annestrand, Lenz, Bird, James, 2017).

Alarcon at all, (2016) melihat pengaruh faktor sosioekonomi terhadap malnutrisi. Untuk kasus Nairobi, ia menunjukkan karakteristik sosioekonomi, yaitu pendidikan dan pendapatan, mempengaruhi kecenderungan keluarga memiliki anak-anak yang mengalami malnutrisi dan tumbuh kerdil. Wanita yang berpendidikan rendah



cenderung anaknya mengalami stunting, sementara pendapatan yang lebih tinggi dikaitkan dengan praktik kesehatan dan gizi yang positif sehingga keluarga bisa mencapai nutrisi optimal. Temuan ini hampir sama dengan penelitian Nwokolo (2017).

Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pencapaian indikator yang dianggap mewakili variabel-variabel bidang MDGs dan SDGs yaitu masalah sosial ekonomi penduduk diantaranya pengurangan indeks kedalaman kemiskinan, menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah batas garis kemiskinan, dan memastikan tidak ada lagi penduduk dengan konsumsi di bawah standar kecukupan gizi (sangat rawan pangan) atau konsumsi minimal <14000 kkal/jiwa (UNDP, 2005). Dengan demikian, tiga indikator digunakan, yakni: 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan tingkat Provinsi; 2) proporsi penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan tingkat provinsi; dan 3) proporsi penduduk yang mengkonsumsi kalori di bawah 1400 ccal per hari per jiwa.

Ketiga indikator ini dijadikan sebagai indikator tunggal yaitu Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK) dengan mengadopsi formula yang diperkenalkan oleh Gentilini & Webb (2015). Untuk mengukur pencapaian tujuan MDGs dan SDGs di Indonesia, maka dalam penelitian ini penulis membandingkan nilai-nilai IKK yang dicapai antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain.

Perhitungan IKK didasarkan pada pendekatan yang diperkenalkan oleh Gentilini & Webb (2008) dan formula yang digunakan BPS (2008) sebagaimana metode menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan formula sebagai berikut:

$$IKK = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 [(x_i - x_i^{min}) / (x_i^{max} - x_i^{min})] \quad (1)$$

di mana x_i adalah nilai aktual indikator i , yakni indikator pertama hingga ketiga. Sementara x_i^{min} dan x_i^{max} masing-masing adalah nilai minimum dan maksimum dari masing-masing indikator. Untuk kepentingan penelitian ini, indikator minimum, x_i^{min} , yang dipakai adalah nilai pada tahun 2010, dan indikator maksimum, x_i^{max} , adalah nilai pada tahun 2015.

Penghitungan Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK) dilakukan melalui tahap-tahap di bawah ini. Pertama dihitung Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tingkat Provinsi untuk tahun tertentu (t) seperti dalam formula berikut:



$$P1_t^i = \frac{1}{n} \sum_i^q \left(\frac{GK_t^i - y_t^i}{GK_t^i} \right) \quad (2)$$

di mana $P1_t^i$ adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan provinsi i pada tahun t . $P1$ adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. GK_t^i adalah garis kemiskinan di provinsi i pada tahun t , y_t^i adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan oleh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di provinsi i pada tahun t , q adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, n adalah jumlah penduduk seluruhnya. Sementara itu dua indikator lainnya adalah proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan dan proporsi penduduk dengan konsumsi gizi di bawah standar kecukupan gizi sebagaimana disebut sebelumnya.

Analisis data panel digunakan dalam penelitian ini. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, pengamatan terhadap kualitas hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan tidak cukup jika diamati hanya pada satu titik waktu, tapi perlu pengamatan pada beberapa periode waktu. Kedua, menurut Baltagi (2005), dengan menggunakan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi, lebih efisien, dan dapat dihindari masalah multikolinearitas. Ketiga, data panel lebih unggul digunakan dalam mempelajari perubahan yang dinamis, lebih dapat mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi pada data *cross section* dan *time series* murni. Keempat, data panel memungkinkan data tersedia dengan observasi lebih banyak.

Model regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$IKK_{it} = \beta_0 + \beta_1 EDS_{it} + \beta_2 EDT_{it} + \beta_k \sum_1^4 X_{it} + \mu_{it} \quad (3)$$

$$i = 1, \dots, 33$$

$$t = 2010, 2015, 2016, 2017$$

EDS_{it} adalah persentase penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan sekunder (SMA sederajat) yang ditamatkan penduduk di provinsi i pada tahun t . EDT_{it} adalah persentase penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan tersier (D3/S1) yang ditamatkan penduduk di provinsi i pada tahun t .

X_{it} adalah vektor variabel-variabel kontrol, terdiri dari tingkat pendapatan per kapita (PPC) dalam satuan rupiah; jumlah pekerja mandiri (JPM), yaitu persentase penduduk yang tergolong sebagai pekerja mandiri seperti pedagang, wiraswata, dokter yang menjalankan praktek sendiri, artis, dan lain-lain; jumlah pekerja formal (JPF), yaitu



persentase pekerja sebagai karyawan/pegawai/buruh, yang bekerja secara terkoordinir, terorganisir dengan administratif yang jelas, upah yang layak, tanpa beban psikologis, bekerja untuk atasan atau majikan, dengan jam kerja terukur; dan jumlah pekerja bebas nonpertanian (PNP), yaitu persentase penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian dalam kategori bermacam-macam pekerjaan seperti tukang kebun, pembantu rumah tangga, tukang rumput, pedagang keliling. Semua variabel kontrol diobservasi menurut provinsi i pada tahun t . μ_{it} adalah faktor-faktor pengganggu (*disturbance terms*).

Untuk memilih model data panel mana yang paling tepat, dilakukan uji signifikansi model. Pertama, dilakukan dengan uji Chow untuk menentukan apakah model Fixed Effects (FEM) atau Common Effects Model (CEM) yang dipilih. Kemudian, jika FEM model yang dipilih, dilanjutkan uji Hausman untuk menentukan mana di antara FEM atau Random Effect Model (REM) yang dipilih. Uji Langrange Multiplier juga dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah model REM lebih baik dari model CEM. Kemudian dilakukan uji signifikansi FEM atau REM. Bila salah satu dari hasil pengujian diatas ternyata FEM dan REM lebih baik dari metode CEM, pengujian dilakukan untuk memilih model paling baik antara FEM atau REM. Setelah model estimasi regresi yang tepat untuk data panel telah terpilih, selanjutnya dilakukan pengujian untuk memilih estimator dengan struktur varians-covarians dari residual yang lebih baik. Jika terpilih model random effect maka pengujian untuk memilih estimator dengan struktur varians-covarians lebih baik digunakan.

Hasil dan Pembahasan

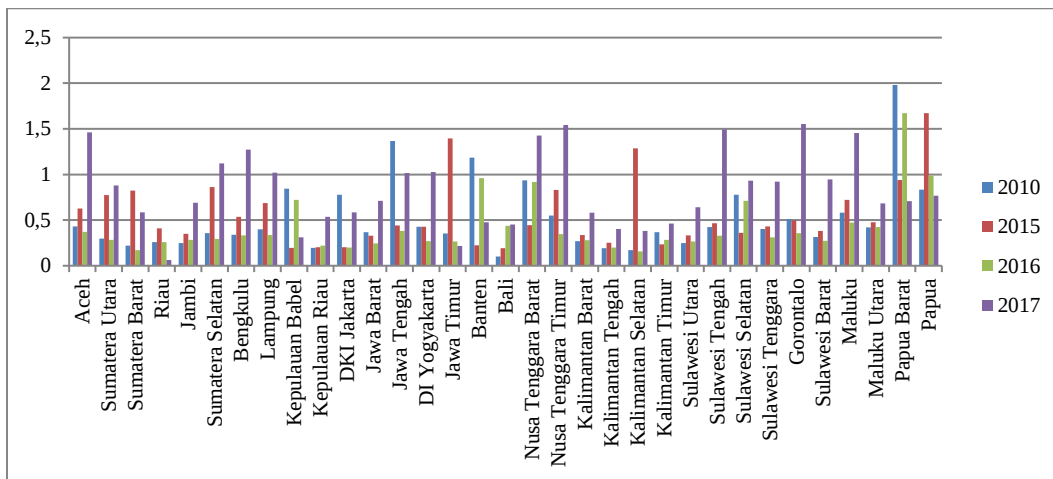
Pemilihan Model

Uji statistik terhadap variabel terikat IKK memberikan hasil bahwa uji Chow menunjukkan nilai P-value 0.0000, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai kritis 0,05, yang berarti bahwa H_0 diterima, maka model yang terpilih adalah FEM. Hasil Hausman menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak, bermakna bahwa model yang terpilih adalah FEM, bukan REM. Uji Langrange Multiplier dilakukan apabila model CEM dan FEM tidak konsisten. Namun hasil-hasil uji di atas menunjukkan konsistensi penggunaan FEM, maka Uji Langrange Multiplier tidak perlu dilakukan lagi.



Capaian Indeks Kemiskinan dan Kelaparan

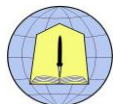
Capaian terhadap indikator kemiskinan dan kelaparan selama periode pengamatan pada tahun 2010 dan 2015 dalam program MDGs serta tahun 2016-2017 dalam program SDGs di Indonesia untuk masing-masing provinsi dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar: Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK) penduduk Indonesia dalam MDGs dan SDGs

Dapat dilihat adanya variasi capaian IKK antarprovinsi di Indonesia. Pada tahun 2010 dan 2015 provinsi yang memiliki indeks kemiskinan dan kelaparan di atas rata-rata nasional adalah Provinsi Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, namun provinsi yang tinggi nilai IKK pada tahun 2010 adalah Papua dengan IKK 0.647, diikuti oleh Papua Barat dengan angka 0.574, kemudian Maluku dengan nilai 0.493. Ketiga provinsi ini masih mempunyai angka IKK dibawah target MDGs dan SDGs.

Untuk tahun 2010 dan 2015 provinsi dengan pencapaian angka di bawah rata-rata nasional adalah selain provinsi yang disebutkan di atas, yaitu Sumatera Selatan, Aceh, Babel, Bali dan lainnya, namun yang rendah nilai IKK diantara ketiga provinsi ini adalah Provinsi Bali dengan nilai 0.114, dan Banten dengan nilai 0.146. Kedua provinsi ini mempunyai IKK di atas target MDGs dan SDGs. Pada tahun 2015 Maluku tidak lagi termasuk provinsi dengan capaian IKK yang tertinggi dibandingkan tahun 2010, IKK provinsi tersebut sudah mengalami penurunan dari angka 0.4936 menjadi 0.42, artinya ada perbaikan pada taraf hidup untuk provinsi tersebut. Ini merupakan pencapaian yang positif dibandingkan pencapaian IKK lima tahun sebelumnya.



Pada tahun 2016 IKK yang tertinggi masih ada di Provinsi Papua yaitu 0.5086, kemudian Papua Barat 0.468, masih berada di atas rata-rata nasional. Provinsi yang berada di atas rata-rata nasional pada tahun tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Bengkulu, dan semua provinsi tersebut berada di bawah target MDGs-SDGs. Pada tahun 2016 Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan IKK dengan capaian 0.123 bahkan digolongkan sebagai provinsi dengan capaian terendah pada tahun tersebut, diikuti Kalimantan Selatan dengan capaian 0.133, dan Provinsi Bali mengalami penurunan dari 0.114 menjadi 0.100, ketiga provinsi ini berada di atas target MDGs dan di bawah rata-rata nasional.

Pada tahun 2017 provinsi yang masih tinggi pencapaian IKK selain Provinsi Papua adalah Papua Barat dan Maluku masing-masing 0.437 dan 0.492, melampaui angka rata-rata nasional. Gagal panen dan kekeringan, sulitnya akses pada daerah pedalaman adalah penyebab dan semakin mempertahankan indeks kemiskinan dan kelaparan di wilayah tersebut (Detik.com, 2018). Yang terjadi pada kuartal ketiga pada tahun 2017 dan banjir di sebagian wilayah menjadi penyebab kemiskinan dan kelaparan di provinsi tersebut. Sementara itu, capaian terendah pada tahun tersebut adalah Provinsi Bali dengan nilai indeks sebesar 0.007.

Rata-rata provinsi mengalami penurunan nilai IKK, tetapi penurunannya relatif lambat setiap tahun (lihat Tabel 1). Semua provinsi relatif sama dalam penurunan IKK, rata-rata hanya menurun di bawah 0.4 persen setiap tahunnya, kecuali Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil menurunkan IKK secara drastis dalam waktu 5 tahun dengan capaian 0.4645 pada tahun 2010 menjadi 0.2147 pada tahun 2015, hingga menurun kembali pada tahun 2017 menjadi 0.1634. Begitu juga Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang cepat dari nilai IKK 0.2372 menjadi 0.0790 pada tahun 2017 dan terendah pada tahun tersebut.

Tabel 1. Pencapaian IKK Penduduk Indonesia Rata-Rata Nasional

Tahun	2010	2015	2016	2017
Pencapaian IKK rata-rata	0.4560	0.4011	0.3747	0.3612

Sumber: Laporan MDGs (2015) dan BPS (2017) data diolah

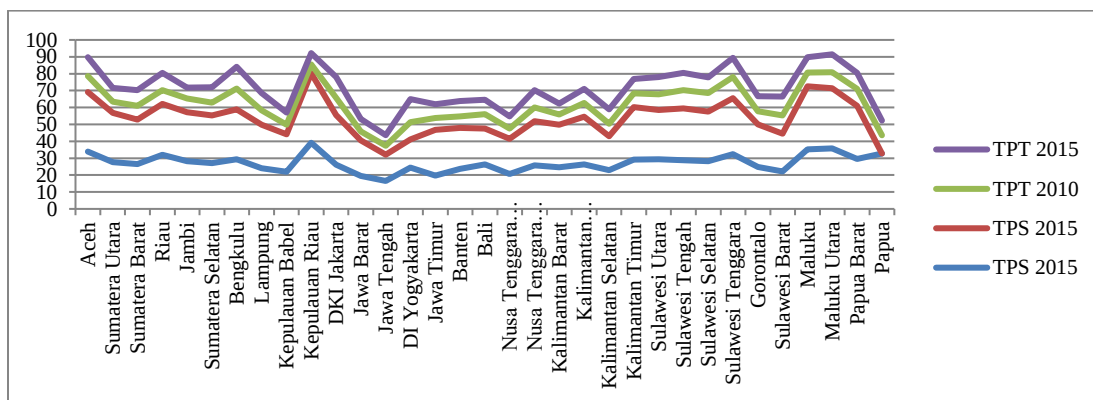
Nilai IKK secara rata-rata nasional mengalami penurunan, tetapi penurunannya belum terealisasi sesuai harapan dalam target MDGs dan SDGs. Pemerintah menginginkan untuk tahun 2020 Indonesia dapat mencapai nilai IKK mendekati nol, tetapi jika



melihat nilai pada tahun 2017, tampaknya harapan tersebut belum dapat dicapai dan upaya-upaya lebih lanjut masih perlu dilakukan dan diberi perhatian khusus.

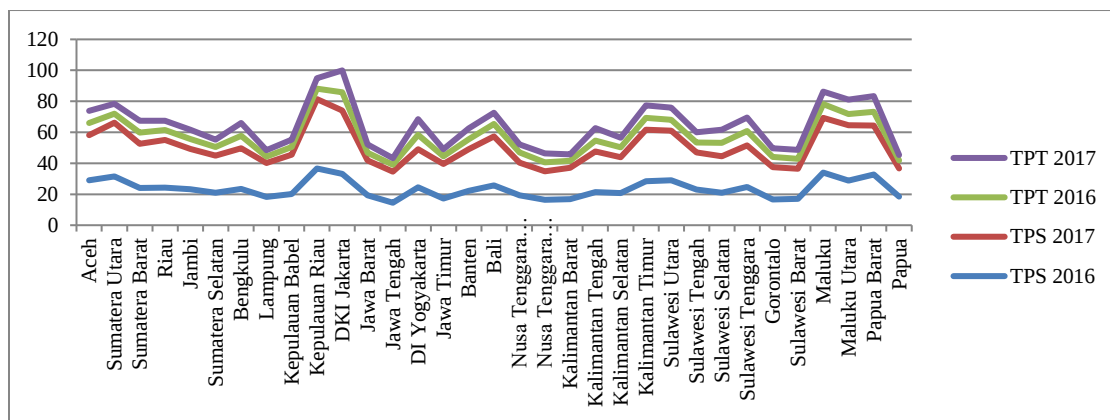
Capaian Pendidikan

Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang menamatkan pendidikan sekunder lebih tinggi dari pada yang menamatkan pendidikan tersier dalam periode MDGs. Rata-rata yang menamatkan pendidikan sekunder 30 persen, tetapi yang menamatkan pendidikan tersier hanya 8,25 persen. Pada tahun 2010 penduduk Indonesia yang menamatkan pendidikan sekunder relatif lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun terakhir. Provinsi yang masih rendah jumlah tamatan pendidikan sekunder adalah Jawa Tengah sebesar 16.54 persen dan Jawa Barat sebanyak 19.55 persen, sementara untuk pendidikan tersier adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5.73 dan Kepulauan Riau sebesar 5.27. Pada tahun yang sama provinsi yang tertinggi menamatkan pendidikan sekunder adalah Maluku Utara sebanyak 35.73 persen, dan yang tinggi tamatan pendidikan tersier adalah Sulawesi Tenggara sebanyak 12.48 persen.



Sumber: Kata Data, 2016.

Gambar 2: Tingkat Pendidikan Sekunder dan Tersier
Penduduk Indonesia Periode MDGs

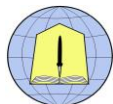


Sumber: Kata Data, 2016.

Gambar 3: Tingkat Pendidikan Sekunder dan Tersier
Penduduk Indonesia Periode-SDGs

Pada tahun 2015 menunjukkan bahwa provinsi yang tinggi jumlah tamatan pendidikan sekunder adalah Kepulauan Riau pada capaian 39.13 persen dan Maluku Utara 35.73 persen, sementara Provinsi terendah adalah Jawa Tengah dengan nilai 16.54 persen. Pada tahun 2016 provinsi yang terendah capaiannya adalah NTT dan Kalimantan Barat dengan nilai masing-masing 16.41 persen dan 16.90 persen. Bagi provinsi yang rendah capaian pada tahun 2016. Pada tahun 2017 tamatan pendidikan sekunder tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 49.79 persen, sementara untuk provinsi terendah adalah Papua sebesar 18,19 persen. Pencapaian tingkat pendidikan tersier yang tertinggi pada tahun yang sama adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 14.24 persen, dan yang terendah masih di Provinsi Papua sebesar 4.51 persen.

Mengamati capaian IKK dan membandingkannya dengan capaian bidang pendidikan, dapat dilihat ada konsistensi, di mana Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Maluku dan Maluku Utara mempunyai capaian pendidikan relatif baik, ke empat provinsi ini juga mempunyai IKK yang relatif rendah. Walaupun observasi korelasi ini tidak serta merta dapat menyimpulkan hubungan pengaruh yang kuat, namun tersirat adanya pergerakan yang menyiratkan hubungan antara kedua variabel. Hasil estimasi terhadap persamaan (3) diperlihatkan pada Tabel 2. Hasil uji pemilihan model menyimpulkan bahwa model yang tepat adalah FEM.

**Tabel 2.** Hasil Estimasi Fixed Effects Model terhadap IKK

Variabel	Koefisien	Prob.	Signifikan	Std.Error
C	0.372610	0.0000*	S	0.0000
PPC	-0.000016	0.0185*	S	0.0010
EDS	-0.001032	0.2198	TS	0.0000
EDT	-0.001843	0.0098*	S	0.0454
JPM	-0.001604	0.0001*	S	0.0366
JPF	-0.000383	0.1901	TS	0.0186
PNP	-0.001475	0.1008	TS	0.8182
R Squared		0.768354		
Prob (F-statistik)		0.000000		
Durbin-Waston Stat		2.589044		
Ket: S = Signifikan		TS = Tidak Signifikan		

Sumber: Hasil estimasi oleh penulis.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa secara simultan variabel penjelas berpengaruh terhadap variabel dependen, dibuktikan dengan nilai uji F probabilitas < dari nilai p-value ($0.00000 < 0.05$). Ini dapat diinterpretasikan bahwa secara bersama-sama variabel tingkat pendapatan, tingkat pendidikan sekunder, tingkat pendidikan tersier dan status pekerjaan layak berpengaruh terhadap IKK di Indonesia selama periode MDGs dan SDGs. Nilai R^2 sebesar 0.920230 dapat diartikan bahwa faktor kualitas hidup, diantaranya tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan sekunder, tingkat pendidikan tersier, status pekerjaan layak sebagai pekerja mandiri, pekerja formal, dan pekerja bebas nonpertanian mampu menjelaskan Indeks Kemiskinan dan Kelaparan (IKK) sebesar 92.02 persen.

Tingkat pendidikan sekunder tidak berpengaruh terhadap penurunan IKK, dibuktikan oleh hasil uji statistik. Ini bermakna bahwa setiap terjadi kenaikan persentase penduduk dengan pendidikan sekunder tidak menyebabkan penurunan IKK. Hal ini dapat menyiratkan bahwa bagi penduduk yang menamatkan pendidikan sekunder memiliki keterbatasan pilihan untuk mendapatkan alternatif pekerjaan. Pendidikan sekunder belum cukup memberi kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pekerjaan dan karenanya secara umum tidak berpengaruh pada penurunan kemiskinan dan juga kelaparan. Berbeda halnya dengan pendidikan tersier, di mana penduduk



yang mempunyai tingkat pendidik jenjang ini mempunyai kesempatan memperoleh pekerjaan lebih besar. Tingkat pendidikan tersier lebih berpengaruh dalam meningkatkan taraf hidup dan pengeluaran per kapita. Tingkat pendidikan tersier mempunyai pengaruh secara signifikan negatif terhadap IKK dengan nilai signifikan sebesar 0.0098, dan nilai koefisien sebesar -0.00184. Ini dapat diartikan bahwa apabila persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tersier meningkat satu persen maka akan mengakibatkan penurunan IKK sebesar 0.018 persen.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis dan tujuan penelitian (Widodo & Wulandari, 2016) kelaparan berhubungan dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, perbedaan kedua tingkat pendidikan tersebut membedakan kecukupan konsumsi harian. Mereka yang berpendidikan menengah cenderung tidak memahami pola konsumsi yang tepat, sehingga lebih beresiko mengalami malnutrisi. Dapat dijelaskan bahwa masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi mempunyai alternatif pilihan untuk memperoleh pekerjaan yang memberikan pendapatan layak. Pendidikan tinggi yang berkualitas mengantarkan sumber daya manusia pada peningkatan kecerdasan untuk membuat pilihan-pilihan yang ada, termasuk pekerjaan dan pengetahuan. Hal ini konsisten dengan yang dikemukakan Nyong (2011) yang menegaskan bahwa peningkatan pengalaman dan pencapaian pendidikan mengurangi kemungkinan menjadi miskin dari individu yang dipekerjakan. Tingkat pendidikan tersier lebih berpengaruh dalam meningkatkan taraf hidup dan pengeluaran per kapita.

Penelitian ini juga sama dengan kesimpulan dari temuan Sofian, Amin, dan Afra (2016) di mana terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendidikan tinggi, terutama tingkat universitas dengan peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Juga ini sesuai dengan penelitian oleh Abdullah (2017) yang menemukan hubungan signifikan pendidikan dan kemiskinan. Kenaikan pendidikan lebih cenderung memberikan peluang mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Pendidikan juga dapat berpengaruh positif terhadap status kerawanan pangan rumah tangga. Juga dapat diinterpretasikan adanya hubungan pendidikan dan kerawanan pangan rumah tangga. Pendidikan mempengaruhi perbedaan kepribadian, menyangkut perilaku dan pola konsumsi. Biasanya masyarakat yang berpendidikan akan cenderung bersikap preventif terhadap penyakit dan cenderung menerapkan hidup sehat, sehingga mereka akan memilih konsumsi kalori yang mencukupi standar nutrisi, dan seimbang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Mutisya, Ngware, Kandala, Kabiru (2016) di mana mereka menyimpulkan bahwa bila tingkat pendidikan



meningkat, maka akan terjadi penurunan ketidakamanan pangan, karena kecakapan memilih dan memilah sumber pangan. Tetapi ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh (Halsey, 2012) bahwa kerawanan pangan tidak bisa diselesaikan dengan tingkat pendidikan formal yang konvensional, tetapi perlu mendirikan sekolah atau pendidikan khusus pertanian pada tingkat sekunder di wilayah pedesaan.

Kesimpulan

Tingkat pendidikan tersier berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IKK. Satu cara untuk meningkatkan taraf hidup, tersirat dari penurunan IKK, adalah dengan peningkatan pendidikan, terutama untuk daerah-daerah yang angka melanjutkan pendidikan ke tersier masih rendah. Penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi mempunyai alternatif pilihan untuk memperoleh pekerjaan yang memberikan pendapatan layak. Pendidikan tinggi dan berkualitas mengantarkan sumber daya manusia pada peningkatan kecerdasan untuk membuat pilihan-pilihan yang ada, termasuk tentang konsumsi. Sementara itu, persentase penduduk dengan pendidikan sekunder tidak signifikan mempengaruhi IKK. Ini menyiratkan penduduk yang menamatkan pendidikan sekunder memiliki keterbatasan pilihan, baik dalam upaya mendapatkan alternatif pekerjaan maupun dalam konsumsi.

Referensi

- Abdullah, Zhou, Tariq Shah, Ali, Ahmad, Ud Din, Ilyas (2017), Faktor affecting houshold food security in rural northen hinterland of Pakistan. Journal of The Saudi Sosiety of Agricultur Science. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jasas.2017.05.033>.
- Abdilaksh, 2013, The Millenium Development Goals (MDGs); Challenges for Poverty Reduction and Service Delivery in the Rural-Urban Continuum. People, Spaces, Deliberation, Exsploringthe. The wold Bank.
- Alarcón Salas, B. Häsler, I. R. Dohoo, K. Colverson, Murage, S. Alonso E. Ferguson, E. M. Fèvre. Rushton, D. Grace, (2016) Nutritional characterisation of low income households of Nairobi: socioeconomic, livestock and gender considerations and predictors of Malnutrition from a cross-sectional. <https://link.springer.com/article/10.1186/s40795-016-0086-2>.
- Annestrand, Lenz, Bird, and James (2017) The Impact of Income Levels on Food Insecurity in Rural Communities, Undergraduate Journal of Service Learning and Community-Based Research, Volume 5. Tarleton State University
- Baltagi, B.H (2005). Econometrics analysis of data panel 3 edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Badan Pusat Statistik (2016), Kajian Indikator Lintas Sector, Potret Awal Tujuan



- Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals) di Indonesia. Badan Pusat Statistik/ Statistic – Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, (2015), Statistik Air Bersih, Mewujudkan Aksesibilitas Air Minum dan Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan, Hasil Survei Kualitas Air Daerah. PPN/BAPPENAS, Kementerian Kesehatan.
- Badan Pusat Statistik, (2016), Tren Tenaga Kerja Indonesia dan Sosial, Periode Agustus 2016 - Katalog 24111007
- Badan Pusat Statistik, (2010), Ketenagakerjaan Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 2010- Katalog 2102030
- Badan Pusat Statistik. 2015. Data Mikro Kemiskinan Indonesia. Katalog 2008735 Badan Pusat Statistik-Jakarta.
- Gentilini, U., & Webb, P. (2015). How are we doing on poverty and hunger reduction ? A new measure of country performance. *Food Policy*, 33(6), 521-532. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.04.005>
- Gunatilake H., Yang J-C, Pattanayak S., and Choe K.A. (2007). “Good Practices for Estimating Reliable Willingness-to-Pay in the Water Supply and Sanitation”, ERD Technical Note No.23, Asian Development Bank.
- Khalsa-Zemel, 2017, Theory of Hungering A Disertation Presented to the Faculty of Saybrook University for the Degree of Doktor of Philosophy in mind Body Medice san Fransisco, California Ocland, published by PROQUEST.LLC (2017).
- Mom Nyong, (2015), The effect of educational attainment on poverty reduction in Cameroon. *Journal of Education Administration and Policy Studies* Vol 2 (1),pp.001-008. Available online at
- Nwokolo, E. (2017), The Influence of Educational Level on Sources of Income and Household Food Security in Alice, Eastern Cape, South Africa. *Journal of Human Ekologi*. Vol -52 Issue- 3
- Sofian, A. Amin., Adam, A.Saat, Afra (2016). Relationship between househould income and educational level (South Darfur rural-Sudan) *Internasional jurnal of Advanced Statistik/ IJASP* 4 (1) 27-30.
- Thafa, Bahadur, (2013). Relationship Between Education And Poverty in Nepal *Economic Journal of Development Issue* Vol 115 & 16 No.1-2
- UNDP (2007). Human Wellbeing in Asia. Devision Indonesia.
- Wang, Feng, Xia, Alkire, (2016). On the Relationship between Income Poverty and Multidimensional Poverty in China Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), Working Paper 101.